

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015, *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka / In Figures 2015*, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Yogyakarta.
- Chaikin, David and J.C Sharman, 2009, *Corruption and Money Laundering*, Palgrave Macmillan, United States.
- Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garnasih, Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2015, *Statistik Kepariwisataaan 2015*, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang (Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library, Bandung.
- Institusi for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta.
- John Madinger, 2006, *Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators– 2nd*, CRC Press, United States of America.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

- Kristina, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Lumban Tobing, G.H.S., 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Nasional Legal Reform Program, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Gramedia, Jakarta.
- PPATK, *Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Pusat Pelaporan dan Analisis dan Transaksi Keuangan, Jakarta,
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2003, *Bussines Uang Haram*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2002, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjafrien Jahja, Juni, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soewarsono, H. dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Malibu, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Dasar Panduan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yustiavandana, Ivan et.al, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 734.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-12 I 1.02.1 / PPATK/09/11 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 929.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-14/1.02/PPATK/11/14 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1821.

Lampiran Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya mengenai Standar ketentuan internal tentang pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi penyedia barang dan/atau jasa lainnya

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

Anonim, “Perlindungan Notaris/PPAT Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pencucian Uang”, Surabaya 20 Agustus 2016, diunduh dari <http://www.indonesianotarycommunity.com/notaris-ppat-sebagai-pihak-pelapor-tppu-sebuah-dilemma.html> diunduh pada 10 November 2016

Damayanti, Guslina, “Peran Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Halif, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang” *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 2 No 2 November 2012

Humas, 2016, “Daftar Nama Notaris Kota Yogyakarta”, 25 Februari 2016, <https://www.kumham-jogja.info/pengumuman/info-notaris/1361-notaris-kota-yogyakarta.html> diunduh pada 07 Maret 2017.

Husein, Yunus, “Kegiatan Pemutihan Uang (*Money Laundering*)”, *Makalah*, disampaikan dalam rangka seminar *Arthur Andersen Money Laundering Executive*, 20 Maret 2001.

_____, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003.

_____, “Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*) dalam Persepektif Hukum Internasional”, *Journal of International Law* Vol 1, No 2 Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

_____, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Makalah*, disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang tindak pidana pencucian uang, 5-6 Mei 2004.

- _____, “Urgensi Gatekeeper Sebagai Pelapor dalam Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia”, *Journal on Anti Money Laundering*, Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Indonesia, 2013.
- Julian Noor, Hendry, “Jasa Notaris Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Listyaningsih, “Peranan Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Khamisah, Andi et.al, “Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisis*, Desember Vol. 3 No. 2, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Nasution, Edi, 2011, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, <http://www.ppatk.go.id>. diunduh pada 07 Maret 2017.
- PPATK, “Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, *Buletin*, Volume 82/Thn VII/2016, PPATK, Jakarta, 2017.
- Riyaldi, Made et.al, “Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Remi Sjahdeni, Sutan, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No 3 2003
- Vim, 2014, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Di DIY”, Yogyakarta 3 Oktober 2014, diunduh dari <http://jogja.tribunnews.com/2014/10/03/ppatk-terus-telusuri-transaksi-keuangan-mencurigakan-di-diy/> diakses tanggal 13 Desember 2016.